

DINAMIKA GOVERNANCE

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

Framing Isu Pemekaran Brebes Selatan dalam Pemberitaan Media Online Jawa Tengah Periode 2023-2025

Bachtiar Nur Rochman¹, Sri Sutjiatmi¹, Akhmad Habibullah¹

Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia¹

Email Corresponding: bachtiar.nurrochman@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Article history:

Received date: 1 Januari 2026

Revised date: 26 Januari 2026

Accepted date: 27 Januari 2026

DOI:

<https://doi.org/10.33005/jdg.v15i4.5642>

This study analyzes the framing of the South Brebes expansion issue in Central Java online media coverage for the 2023–2025 period. Regional expansion is viewed as an effort to address development gaps, but is also fraught with political interests and administrative challenges. This study uses a qualitative method with a framing analysis model by Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki, which includes syntactic, script, thematic, and rhetorical devices. Primary data consists of news from Suara Merdeka, Jatengdaily, Brebesinfo, Tribun Tipikor, and Suarabrebes, while secondary data are obtained from academic literature and official reports. The results show that the media frame the expansion issue in various ways: Jatengdaily emphasizes community aspirations and geographical aspects, Suara Merdeka emphasizes administrative and political legitimacy, while local media emphasizes narratives of community struggle and optimism. These differences in framing indicate that the media plays an active role in shaping public perception of the urgency of expansion, which has not only social dimensions, but also political and economic dimensions.

Keyword: Expansion, Media Framing, Online Media.

*This article is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0
International Licence.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)*

ABSTRAKSI

Penelitian ini menganalisis framing isu pemekaran Brebes Selatan dalam pemberitaan media online Jawa Tengah periode 2023–2025. Pemekaran daerah dipandang sebagai upaya mengatasi kesenjangan pembangunan, namun juga sarat kepentingan politik dan tantangan administratif. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang meliputi perangkat sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Data primer berupa berita dari Suara Merdeka, Jatengdaily, Brebesinfo, Tribun Tipikor, dan Suarabrebes, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur akademik serta laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media membungkai isu pemekaran secara beragam: Jatengdaily menekankan aspirasi masyarakat dan aspek geografis, Suara Merdeka menggarisbawahi legitimasi administratif dan politik, sementara media lokal menonjolkan narasi perjuangan dan optimisme masyarakat. Perbedaan framing ini mengindikasikan bahwa media berperan aktif dalam membentuk persepsi publik terhadap urgensi pemekaran, yang tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga politik dan ekonomi.

Kata Kunci: Pemekaran, Framing Media, Media Online

PENDAHULUAN

Desentralisasi menjadi salah satu agenda utama reformasi pemerintahan di berbagai negara berkembang agar peningkatan kegiatan pemerintahan menjadi efektif dan efisien di berbagai aspek. Suatu penelitian di Kenya dan Chile menunjukkan bahwa meskipun pemekaran dapat meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar, dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat masih bervariasi dan bergantung pada kapasitas kelembagaan lokal (Ochieng, 2023; Ritter, 2025). Hal ini juga tampak di kawasan Asia Tenggara, di mana proses desentralisasi sering kali diwarnai oleh perbedaan kapasitas fiskal dan birokrasi antar daerah (Anantanatorn et al., 2024). Indonesia salah satu negara yang dianggap mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Lewis, 2023). Desentralisasi juga terbukti meningkatkan akuntabilitas, partisipasi publik, dan efisiensi pemerintahan lokal ketika diiringi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai. Salah satu bentuk konkret dari desentralisasi adalah pemekaran wilayah (regional splitting), yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada warga dan memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah (Herrera & Pino, 2023; Luo & Liu, 2022). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa hasil pemekaran wilayah tidak selalu menghasilkan peningkatan kinerja pembangunan secara signifikan. Pemekaran sering kali justru meningkatkan beban biaya administrasi tanpa diikuti peningkatan efisiensi pelayanan public, desentralisasi dan pemekaran wilayah kerap membawa konsekuensi politik dan fiskal yang kompleks karena pemerintah daerah baru membutuhkan biaya yang cukup tinggi (Dahis & Sberman, 2024; Rambe et al., 2022; Swianiewicz, 2024). Khusus di Indonesia, pemekaran wilayah menjadi fenomena yang sangat dinamis sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001. Meskipun bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan, berbagai penelitian menemukan bahwa hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Pemekaran di wilayah Papua, misalnya, belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, dan minimnya partisipasi publik (Maisari, 2023; Setiawan & Widyana, 2023).

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (2024), terdapat lebih dari 300 usulan pemekaran daerah yang belum terealisasi, menandakan tingginya tuntutan desentralisasi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Brebes. Kondisi ini menjadikan isu pemekaran Brebes Selatan bukan hanya wacana administratif, tetapi juga arena komunikasi politik lokal yang sarat dengan proses pembingkaian (framing) oleh aktor pemerintah, media, dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya isu pemekaran sering kali dibingkai secara politis untuk kepentingan elite lokal, terutama menjelang momentum elektoral (Fauzani, 2023). Sementara itu, kegagalan dalam mengelola wacana desentralisasi dapat memunculkan konflik kepentingan serta memperlemah kohesi nasional apabila tidak diiringi dengan tata kelola komunikasi publik yang baik (Mukhlis & al., 2025). Maka dari itu, pengalaman pemekaran di berbagai daerah memperlihatkan hasil yang beragam. Studi di Papua menunjukkan bahwa pemekaran tidak semata-mata persoalan administratif, melainkan berkaitan dengan identitas politik, distribusi kewenangan, serta dampak lingkungan (Hefir et al., 2024).

Pembahasan di atas tentang desentralisasi juga mengikuti perkembangan zaman melalui media online, platform digital telah membawa perubahan mendasar terhadap lanskap komunikasi politik di Indonesia. Media daring tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai aktor penting dalam membentuk opini publik melalui konstruksi dan pembingkaian realitas sosial (Permadi et al., 2023; Sihite et al., 2024). Media online memiliki peran strategis dalam menentukan bagaimana isu-isu publik dikemas dan dipersepsi masyarakat, sebab setiap pemberitaan mengandung kepentingan ideologis dan framing tertentu yang mencerminkan posisi redaksi terhadap isu yang diberitakan (Annisarhma & Assegaf, 2024; Utami et al., 2024).

Analisis framing menjadi salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk memahami bagaimana media mengonstruksi realitas sosial. Dengan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M.

Kosicki misalnya, memberikan kerangka analisis terhadap struktur berita melalui empat dimensi: sintaksis, skrip, tematik, dan retoris (Simanjuntak & Abidin, 2023; Taufiqurrahman, 2024). Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi kecenderungan media dalam menonjolkan isu tertentu, memilih narasumber, serta menentukan fokus pemberitaan sesuai kepentingan editorial atau politik. Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa media online kerap memproduksi frame yang beragam terhadap isu publik, mulai dari konflik internasional, bencana, hingga politik lokal. Misalnya, perbedaan sudut pandang antara media nasional dan daerah dalam mengonstruksi narasi bencana dan tanggung jawab pemerintah, atau pada pemberitaan politik, media dapat memperkuat citra positif atau negatif terhadap aktor tertentu tergantung pada kepentingan ideologisnya (Al Majid & Qalban, 2023; Azis, 2023).

Selain itu, studi mengenai pemberitaan isu keamanan data di media daring menggambarkan bagaimana media turut membentuk persepsi publik terhadap kepercayaan pada lembaga pemerintah melalui strategi framing yang menekankan aspek tanggung jawab, krisis, dan legitimasi kebijakan (Ramdhhan et al., 2024). Secara keseluruhan, literatur empiris Indonesia pada periode 2023–2025 menegaskan bahwa media online bukan sekadar kanal komunikasi, tetapi juga arena wacana tempat ideologi, kepentingan politik, dan konstruksi makna saling berinteraksi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana media online membungkai isu-isu kebijakan lokal seperti wacana pemekaran wilayah Brebes Selatan, karena pemberitaan tersebut dapat memengaruhi opini publik dan arah kebijakan pemerintah daerah (Riswandi et al., 2024).

Dalam dinamika tersebut, media online memiliki peran penting dalam membentuk wacana publik. Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membungkai (framing) isu dengan sudut pandang tertentu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dalam lingkungan media sosial ‘networked framing’ dapat mengubah alignment antara framing media resmi dan narasi publik, sehingga mempercepat penyebaran opini seputar isu lokal seperti wacana pemekaran (Zhao & Wang, 2022). Melalui pemilihan kata, fokus pemberitaan, serta aktor yang ditonjolkan, media dapat memengaruhi opini publik tentang apakah pemekaran dipersepsikan sebagai kebutuhan mendesak untuk pemerataan pembangunan atau sekadar kepentingan elit politik (Taufiqurrahman, 2024). Dengan jangkauan yang luas dan kecepatan distribusi informasi, media online menjadikan isu lokal seperti pemekaran Brebes Selatan cepat menjadi perbincangan publik. Framing yang dilakukan media dapat memperkuat legitimasi aspirasi masyarakat atau menonjolkan risiko administratif dan konflik elit. Dengan demikian, media menjadi arena pertarungan wacana yang menentukan arah opini publik terkait pemekaran Brebes Selatan (Wati et al., 2024).

Sejauh ini, penelitian tentang pemekaran seringkali lebih berfokus pada aspek hukum, administratif, atau dinamika politik elit. Kajian yang secara khusus menelaah framing media online terhadap isu pemekaran daerah, khususnya Brebes Selatan, masih sangat terbatas (Sari et al., 2025). Padahal, dalam era digital, framing media menjadi kunci penting untuk memahami bagaimana wacana politik lokal dibentuk dan dipersepsikan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing pemberitaan media online Jawa Tengah mengenai isu pemekaran Brebes Selatan pada periode 2023–2025 dengan menggunakan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik pada studi komunikasi politik lokal sekaligus memberi manfaat praktis bagi masyarakat dan pemerintah. Pertanyaan utama penelitian ini adalah: Bagaimana framing pemberitaan media online Jawa Tengah terhadap isu pemekaran Brebes Selatan periode 2023–2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing untuk memahami bagaimana media online di Jawa Tengah membungkai isu pemekaran Brebes Selatan pada periode 2023 hingga 2025. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah makna dan konstruksi sosial yang dibentuk melalui teks media secara mendalam. Fokus penelitian diarahkan pada

analisis isi pemberitaan, bukan pada kuantitas berita, melainkan pada bagaimana pesan dan narasi dibangun oleh media melalui pilihan bahasa, struktur kalimat, dan penonjolan isu.

Analisis data berlandaskan pada model analisis framing yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (1993). Model ini menjelaskan bahwa teks berita tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengonstruksi realitas sosial melalui struktur bahasa dan cara media menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa. Menurut Pan dan Kosicki, proses pembingkaihan berita dapat dianalisis melalui empat perangkat utama yang saling berkaitan, yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Keempat perangkat tersebut menggambarkan bagaimana media menyusun informasi, membangun alur narasi, menonjolkan isu utama, serta menggunakan gaya bahasa dan simbol tertentu untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan.

Penelitian ini juga menggunakan konsep desentralisasi dan pemekaran daerah sebagai landasan konseptual pendukung. Pemekaran daerah merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi yang bertujuan memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah (Kusuma & Sintasari, 2023; Qurrota & Prasetyo, 2024). Dengan demikian, pembahasan mengenai pemekaran Brebes Selatan tidak hanya dilihat dari dimensi politik dan administratif, tetapi juga sebagai refleksi atas upaya mewujudkan keadilan pembangunan di tingkat lokal. Melalui pemilihan isu, narasi, dan sudut pandang tertentu, media dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memahami kebijakan pemerintah maupun dinamika politik di daerah (Sari et al., 2025; Taufiqurrahman, 2024). Oleh karena itu, teori framing Pan dan Kosicki digunakan untuk menganalisis struktur pemberitaan media, sedangkan teori desentralisasi dan komunikasi politik lokal memberikan konteks yang lebih luas terhadap isu yang diteliti, yaitu bagaimana media berperan dalam mengonstruksi makna dan opini publik mengenai pemekaran Brebes Selatan.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari teks berita media online yang secara eksplisit membahas isu pemekaran Brebes Selatan. Media yang dijadikan objek kajian meliputi Suara Merdeka, Jatengdaily, Brebesinfo, Tribun Tipikor, dan SuaraBrebes. Pemilihan media tersebut dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa media-media tersebut memiliki jangkauan pembaca yang luas di tingkat regional dan memiliki kecenderungan aktif memberitakan isu politik lokal di Jawa Tengah.

Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi melalui penelusuran arsip berita dengan kata kunci “pemekaran Brebes Selatan,” “Brebes Selatan DOB,” dan “pemekaran Bumiayu” pada rentang waktu tahun 2023 hingga 2025. Setiap berita yang diperoleh kemudian diverifikasi untuk memastikan relevansinya dengan fokus penelitian. Selain data primer berupa teks berita, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang berasal dari artikel jurnal, laporan resmi pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik, serta literatur akademik yang berkaitan dengan isu pemekaran daerah dan teori framing media.

Untuk menjaga keabsahan dan validitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Langkah ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis antar media dan mengaitkannya dengan literatur akademik serta data pendukung lainnya. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya merefleksikan pandangan subjektif peneliti, tetapi juga memperoleh pemberian ilmiah melalui kesesuaian dengan teori dan konteks empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pemberitaan Media Online

Isu pemekaran Brebes Selatan memperoleh perhatian signifikan dari media online pada periode 2023–2025. Media regional seperti Jatengdaily dan Suara Merdeka menjadi saluran utama pemberitaan, meskipun intensitas dan fokus liputan berbeda di tiap tahun. Jatengdaily (2024) menurunkan laporan berjudul “Kota Bumiayu Bisa Menjadi Ibu Kota Brebes Selatan” yang menekankan potensi Bumiayu sebagai pusat pemerintahan daerah otonomi baru. Pemberitaan ini menggarisbawahi aspirasi masyarakat dan ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Brebes, sehingga pemekaran diposisikan sebagai solusi strategis untuk pemerataan (Jatengdaily, 2024).

Sementara itu, Suara Merdeka secara konsisten menyoroti isu pemekaran dalam beberapa periode. Artikel tahun 2023 mengulas daftar calon daerah otonomi baru (DOB) yang diajukan ke pusat, termasuk Brebes Selatan (Suara Merdeka, 2023). Tahun 2025, Suara Merdeka menurunkan dua berita penting: pertama, “Brebes Selatan Dinilai Paling Siap Jadi DOB, Pemprov Jateng Apresiasi Kerja Presidium” yang menegaskan dukungan administratif dan politik dari pemerintah daerah (Suara Merdeka, 2025); kedua, “Viral, Usulan DPD RI tentang Brebes Selatan” yang menggambarkan isu pemekaran masuk ranah politik nasional dan perbincangan publik luas melalui media sosial (Suara Merdeka, 2025). Selain media utama tersebut, beberapa portal lokal lain turut memperkuat wacana, seperti Brebesinfo yang melaporkan sinyal positif dari Pemprov Jateng terkait kesiapan Brebes Selatan (Brebesinfo, 2025), Tribun Tipikor yang menyoroti perjuangan presidium pemekaran (Tribun Tipikor, 2025), serta Suarabrebes yang menampilkan optimisme masyarakat terhadap lahirnya DOB baru (Suarabrebes, 2025).

Dari variasi pemberitaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa framing media online bergerak dalam tiga kerangka utama: pertama, aspirasi masyarakat dan pemerataan Pembangunan (Jatengdaily, 2024), kedua, kesiapan administratif dan dukungan pemerintah daerah (Suara Merdeka, 2025), dan ketiga, dinamika politik dan legitimasi elite nasional (Suara Merdeka, 2025). Dengan demikian, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk persepsi publik sesuai orientasi redaksi dan konteks politik yang berkembang.

Tabel 1. Data Primer Berita Online Tentang Pemekaran Brebes Selatan (2023-2025).

No.	Judul Berita	Media	Tanggal Terbit
1.	Daftar Usulan Dob Baru, Termasuk Brebes Selatan	Suara Merdeka	10 Juli 2023
2.	Kota Bumiayu Bisa Menjadi Ibukota Brebes Selatan	Jatengdaily	16 Agustus 2024
3.	Brebes Selatan Dinilai Paling Siap Jadi DOB, Pemprov Jateng Apresiasi Kerja Presidium	Suara Merdeka	1 Juni 2025
4.	Viral, Usulan DPD RI Terkait Daftar Usulan Pembentukan DOB Baru: Kab.Banyumas Barat,Purwokerto, Cilacap Barat, Dan Brebes Selatan.	Suara Merdeka (Banyumas)	24 Juli 2025
5.	Brebes Selatan Paling Siap Mekar, Pemprov Jateng Beri Sinyal Positif Tunggu Moratorium Di Cabut	Brebesinfo	1 Juni 2025
6.	Perjuangan Untuk Mewujudkan Kabupaten Brebes Selatan Terus Berlanjut	Tribun Tipikor	26 April 2025
7.	Selamat Datang Kabupaten Brebes Selatan: Pemerikaran Yang Dinanti Dari Tanah Perbatasan	Suara Brebes	18 Juli 2025

Sumber : Laman berita media online terkait Isu Pemekaran Wilayah Brebes Selatan tahun 2023-2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai pemekaran Brebes Selatan tidak terdistribusi merata setiap tahun pada semua media. Suara Merdeka menjadi media yang paling konsisten, dengan liputan beruntun sejak 2023 hingga 2025, sedangkan Jatengdaily baru mengangkat isu ini pada 2024. Adapun media lokal seperti Brebesinfo, Tribun Tipikor, dan Suarabrebes lebih menonjolkan suara masyarakat akar rumput serta antusiasme presidium pemekaran. Perbedaan intensitas dan sudut pandang ini mengonfirmasi bahwa media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi secara aktif membentuk kerangka berpikir publik. Dengan kata lain, isu pemekaran Brebes Selatan diposisikan secara berbeda sesuai orientasi redaksi: ada yang menekankan aspirasi masyarakat, ada yang menyoroti dukungan administratif, dan ada pula yang menampilkan dynamika politik nasional.

Analisis Framing Media Online

Analisis framing digunakan untuk melihat bagaimana media membentuk realitas sosial melalui pemilihan kata, sudut pandang, dan struktur pemberitaan. Model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki menekankan empat elemen utama dalam teks berita: sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Dengan model ini, dapat ditelusuri perbedaan kerangka yang dipakai oleh media dalam memberitakan isu pemekaran Brebes Selatan.

Jatengdaily (2024) cenderung menekankan aspek geografis dan aspirasi masyarakat. Secara sintaksis, berita disusun dengan lead yang langsung menyebut Bumiayu sebagai calon ibu kota, sehingga memusatkan perhatian pembaca pada simbol wilayah. Pada level skrip, struktur narasi menekankan dukungan tokoh lokal. Sedangkan secara tematik, artikel menempatkan pemekaran sebagai solusi ketimpangan pembangunan. Pilihan kata seperti “bisa menjadi ibu kota” atau “layak untuk dimekarkan” memperlihatkan strategi retoris untuk menegaskan urgensi pemekaran.

Suara Merdeka (2023, 2025) menampilkan frame administratif dan legitimasi pemerintah. Sintaksis berita umumnya diawali dengan penyampaian fakta objektif, misalnya daftar DOB atau pernyataan resmi Pemprov Jateng. Skrip yang digunakan menekankan dukungan birokrasi dan proses hukum formal. Pada level tematik, isu pemekaran dikonstruksikan sebagai agenda yang sah dan realistik. Retorika yang dipakai seperti “paling siap” dan “apresiasi Pemprov” menunjukkan penguatan legitimasi.

Sementara itu, Suara Merdeka (2025) mengonstruksi isu dalam kerangka politik nasional. Lead berita diawali dengan fenomena viral di media sosial, menunjukkan fokus pada resonansi publik digital. Skrip berita menyoroti reaksi politikus pusat dan dokumen resmi DPD RI, sedangkan tema yang muncul adalah pentingnya perhatian nasional terhadap isu daerah. Retorika seperti “viral” dan “heboh” digunakan untuk memperluas daya tarik isu di mata publik.

Media lokal lain, seperti Brebesinfo, Tribun Tipikor, dan Suarabrebes, cenderung menekankan narasi perjuangan masyarakat. Framing mereka lebih menyoroti aspirasi presidium, perlawanan terhadap moratorium, dan optimisme masyarakat lokal. Elemen retoris yang muncul misalnya “perjuangan terus berlanjut” atau “pemekaran yang dinanti”, yang memperkuat sentimen emosional dan dukungan akar rumput.

Tabel 2. Analisis Framing Pemberitaan Media Online dengan Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

Media dan tahun	Sintaksis	Skrip	Tematik	Retoris
Jatengdaily (2024)	Lead menekankan bumiayu sebagai calon	Dukungan tokoh lokal dan argument pemerataan	Pemekaran sebagai solusi ketimpangan pembangunan	“Bisamenjadi ibu kota”, “Layak di mekarkan”

	ibukota DOB			
Suara Merdeka (2023)	Lead menyoroti daftar DOB termasuk brebes selatan	Menyebut daftar resmi DOB	Pemekaran sebagai agenda nasional	“Masuk daftar DOB”
Suara Merdeka (2025a)	Lead menekankan dukungan pemprov jateng	Apresiasi pemerintah terhadap presidium	Pemekaran realistik dan paling siap	“paling siap”, “Apresiasi”
Suara Merdeka (2025b)	Lead di awali dengan isu viral DPD RI	Reaksi public dan dokumen resmi	Pemekaran sebagai isu nasional dan politik	“Viral”. “Heboh”
Brebesinfo (2025)	Lead menekankan kesiapan brebes selatan	Dukungan pemprov jateng	Pemekaran menungu pencabutan moratorium	“Sinyal positif”, “Paling siap”
Tribun Tipikor (2025)	Lead tentang perjuangan presidium	Presidium sebagai aktor utama	Pemekaran sebagai perjuangan berkelanjutan	“Perjuangan terus berlanjut”
Suara Brebes (2025)	Lead otomatis menyambut DOB	Harapan masyarakat	Pemekaran sebagai pemenuhan aspirasi	“Pemekaran yang di nanti”

Sumber : Laman berita media online terkait Isu Pemekaran Wilayah Brebes Selatan tahun 2023-2025,
dengan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kociski

Pada tabel tersebut menggambarkan variasi framing yang digunakan media online dalam memberitakan isu pemekaran Brebes Selatan dengan model Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pada kolom **sintaksis**, terlihat bahwa setiap media membuka berita dengan fokus yang berbeda. (Jatengdaily, 2024) menekankan aspek geografis dengan menyebut Bumiayu sebagai calon ibu kota, sementara Suara Merdeka (2023, 2025) lebih menonjolkan aspek administratif dengan menuliskan daftar DOB atau apresiasi Pemprov Jateng. Di sisi lain, Suara Merdeka (2025) memilih pembuka yang menyoroti fenomena viral, menunjukkan fokus pada resonansi publik di media sosial. Dari segi **skrip**, berita Jatengdaily dibangun dengan dukungan tokoh lokal, sedangkan Suara Merdeka lebih menekankan proses birokrasi dan legitimasi pemerintah. Media lokal seperti Tribun Tipikor dan Suara Brebes justru menekankan narasi perjuangan masyarakat serta harapan publik akar rumput. Pada **tematik**, media besar (Jatengdaily dan Suara Merdeka) lebih sering mengaitkan pemekaran dengan pemerataan pembangunan atau kesiapan administratif, sedangkan media lokal cenderung menyoroti perjuangan kolektif dan optimisme masyarakat. Sementara **retoris** yang dipakai memperlihatkan perbedaan strategi bahasa. Jatengdaily menggunakan diksi “bisa menjadi ibu kota” yang menekankan peluang, Suara Merdeka memakai istilah “paling siap” atau “apresiasi” untuk menegaskan legitimasi, sedangkan media lokal

memilih kata-kata emosional seperti “perjuangan terus berlanjut” atau “pemekaran yang dinanti” untuk membangun keterikatan emosional dengan pembacanya.

Implikasi Isu Pemekaran

Isu pemekaran Brebes Selatan bukan hanya wacana administratif, melainkan juga memiliki implikasi sosial, politik, dan ekonomi. Framing media online yang beragam menunjukkan bahwa pemekaran dipersepsikan secara berbeda oleh aktor-aktor yang terlibat dan publik pembaca.

Dari sisi **sosial**, pemberitaan yang menekankan aspirasi masyarakat (Jatengdaily, 2024; Suarabrebes, 2025) menunjukkan adanya harapan besar terhadap pemerataan pembangunan. Selama ini wilayah selatan Brebes dinilai tertinggal dibandingkan wilayah utara. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyebut bahwa salah satu motif utama pemekaran daerah adalah mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah (Kusuma & Sintasari, 2023).

Dari sisi **politik**, liputan Suara Merdeka (2023; 2025a; 2025b) memperlihatkan bahwa isu ini juga merupakan bagian dari dinamika kekuasaan. Dukungan Pemprov Jateng dan masuknya Brebes Selatan dalam daftar usulan DPD RI mengindikasikan adanya legitimasi formal. Namun, penggunaan dixi seperti “viral” dan “heboh” juga menunjukkan bahwa isu ini sensitif terhadap dinamika politik nasional dan dapat dimanfaatkan oleh elite untuk kepentingan politik tertentu (Qurrota A’yuni & Hari Prasetyo, 2024).

Dari sisi **ekonomi**, media lokal seperti Brebesinfo menekankan potensi kesiapan daerah baru bila moratorium dicabut, sementara literatur menyebut bahwa pemekaran tidak selalu berdampak positif jika tidak diikuti penguatan kapasitas fiskal daerah (Hefir et al., 2024). Oleh karena itu, wacana pemekaran Brebes Selatan harus dibaca secara hati-hati, tidak hanya sebagai solusi kesenjangan, tetapi juga tantangan dalam pemanfaatan pembangunan.

Tabel 3. Implikasi Pemberitaan Isu Pemekaran Brebes Selatan

Dimensi	Focus media	Temuan utama	Relevansi akademik
Sosial	Jatengdaily (2024), Suarabrebes (2025)	Aspirasi masyarakat dan pemerataan pembangunan	Sesuai dengan argumen bahwa pemekaran sering dipicu kesenjangan wilayah, menurut (Kusuma & Sintasari, 2023)
Politik	Suara merdeka (2023, 2025a, 2025b)	Dukungan formal pemerintah dan viralitas isu level nasional	Pemekaran adalah isu politis dan sensitive terhadap kepentingan elite, menurut (Qurrota A’yuni & Hari Prasetyo, 2024)
Ekonomi	Brebesinfo (2025), tribun tripkor (2025)	Kesiapan DOB, perjuangan presidium menghadapi moratorium	Pemekaran berisiko bila kapasitas fiscal daerah lemah, menurut (Hefir et al., 2024)

Sumber : Laman berita media online terkait Isu Pemekaran Wilayah Brebes Selatan tahun 2023-2025

Pada dimensi **sosial**, media cenderung menyoroti kesenjangan pembangunan dan harapan masyarakat. Pada dimensi **politik**, fokus utamanya adalah legitimasi pemerintah serta respon elite nasional. Sementara itu, pada dimensi **ekonomi**, wacana pemekaran dikaitkan dengan kesiapan infrastruktur dan kebijakan moratorium. Integrasi analisis media dengan literatur akademik memperlihatkan bahwa pemberitaan media online tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan diskursus akademik dan kebijakan publik.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa framing media online terhadap isu pemekaran Brebes Selatan memiliki implikasi yang kompleks. Media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga membentuk persepsi publik yang dapat memengaruhi arah kebijakan. Perbedaan kerangka antara aspirasi masyarakat, legitimasi politik, dan kesiapan ekonomi mengindikasikan bahwa pemekaran bukan sekadar agenda teknis, melainkan medan kontestasi wacana. Bagi akademisi, hal ini penting karena menunjukkan bagaimana media lokal dan regional berperan dalam agenda setting pembangunan daerah. Bagi pembuat kebijakan, analisis ini menegaskan perlunya kehati-hatian dalam membaca opini publik, karena framing media dapat memperkuat atau justru menantang legitimasi pemekaran.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemberitaan media online mengenai isu pemekaran Brebes Selatan tidak bersifat seragam, melainkan dibentuk melalui kerangka framing yang berbeda sesuai orientasi redaksi masing-masing. Media besar seperti Suara Merdeka cenderung menonjolkan dimensi administratif dan legitimasi politik, sementara Jatengdaily lebih menekankan pada aspirasi masyarakat dan aspek geografis, sedangkan media lokal seperti Brebesinfo, Tribun Tipikor, dan Suarabrebes menampilkan narasi perjuangan dan optimisme masyarakat akar rumput. Perbedaan konstruksi ini menunjukkan bahwa media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk persepsi publik mengenai urgensi pemekaran sebagai solusi ketimpangan pembangunan.

Secara lebih luas, dinamika framing tersebut mengindikasikan bahwa isu pemekaran Brebes Selatan memiliki implikasi multidimensi. Dari sisi sosial, media membantu memperkuat aspirasi dan identitas masyarakat wilayah selatan Brebes. Dari sisi politik, pemberitaan memperlihatkan bahwa pemekaran

merupakan agenda yang sarat kepentingan dan sensitif terhadap dinamika elite, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dari sisi ekonomi, media memberi sinyal bahwa kesiapan infrastruktur dan dukungan fiskal menjadi faktor penentu keberhasilan pemekaran. Dengan demikian, isu ini harus dipahami sebagai arena kontestasi wacana yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan masyarakat, pemerintah, maupun aktor politik.

Sebagai saran, penelitian ini menegaskan pentingnya peran media lokal dan regional dalam mengawal isu-isu strategis seperti pemekaran daerah. Pemerintah daerah dan pusat perlu membaca wacana yang berkembang di media secara kritis, sebab konstruksi pemberitaan berpotensi memengaruhi opini publik dan legitimasi kebijakan. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian dengan mengombinasikan analisis framing media dan penelitian lapangan, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai relasi antara media, masyarakat, dan kebijakan pemekaran. Dengan cara ini, diskursus mengenai pemekaran Brebes Selatan dapat ditempatkan tidak hanya sebagai isu administratif, tetapi juga sebagai refleksi atas perjuangan keadilan pembangunan dan representasi politik masyarakat lokal.

REFERENCES

- Al Majid, A. A., & Qalban, A. A. (2023). Analisis Framing Media Online dalam Pemberitaan Mantan Politikus PDI Perjuangan yang Mendukung Kandidat Lain (Kompas & Detik). *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7(2), 17–27. <https://doi.org/10.52802/hjh.v7i2.636>
- Anantanatorn, A., Maskur, A., & Phuengpha, N. (2024). Decentralization and Local Governance in

- Southeast Asia: A Comparative Analysis of Thailand and Indonesia. In *Proceedings of the 7th International Conference on Public Administration and Governance (ICOPAG)*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2024.2354740>
- Annisarahma, R., & Assegaf, A. H. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Tempo.co dan CNNIndonesia.com Mengenai Konflik Israel-Hamas pada Oktober 2023. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(6). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6>
- Azis, S. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Tribun Sulbar.com Pasca Gempa Sulbar 2021. *Journics: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2(1). <https://doi.org/10.35905/journics.v2i1.6386>
- Dahis, R., & Szerman, C. (2024). Decentralizing Development: Evidence from Government Splits. In *CESifo Working Paper Series No. 10927*. https://ideas.repec.org/p/ces/ceswps/_10927.html
- Fauzani, M. A. (2023). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pemekaran Provinsi di Papua. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 241–258. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i3.1164>
- Hefir, S., Utami, I., Nursyawal, M., Zulfa, M. A., & Pramudia, A. (2024). Kegagalan Dan Keberhasilan Pasca Proses Pemekaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 200–212. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i4.337>
- Herrera, R., & Pino, G. (2023). The effect of administrative divisions on the distribution of individual income in the new territories of Chile. *World Development*, 171, 106345. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106345>
- Kusuma, W., & Sintasari, S. A. (2023). Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 1(1), 64–73. <https://doi.org/10.47268/capitan.v1i1.9933>
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 145–163. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Luo, W., & Liu, Y. (2022). Research on the Impact of Fiscal Decentralization on Governance Performance of Air Pollution—Empirical Evidence of 30 Provinces from China. *Sustainability*, 14(18), 11313. <https://doi.org/10.3390/su141811313>
- Maisari, R. (2023). Problematika Hukum Pembentukan Daerah Otonom Baru di Indonesia. *Lex Renaissance: Jurnal Hukum*, 7(4), 642–655. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art6>
- Mukhlis, A., & al., et. (2025). Decentralization and National Cohesion: The Dilemma of Local Autonomy in Southeast Asia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(1), 77–90. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no1.760>
- Ochieng, J. (2023). Media framing of the first administration of devolution in Kenya. *African Journalism Studies*, 44(3). <https://doi.org/10.1080/23743670.2023.2204446>
- Permadi, T., Muyassaroh, M., Purnaweni, H., & Widodo, T. (2023). Media Massa dan Konstruksi Realitas: Analisis Framing Terhadap Pemberitaan UU IKN pada Media Online Tempo.co dan Mediaindonesia.com. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(1). <https://doi.org/10.31315/jik.v22i1.7754>
- Qurrota, A., & Prasetyo, H. (2024). Rekonstruksi Regulasi Pemekaran Wilayah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Daerah. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan HAM*, 4(5), 110–119. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2180>
- Qurrota A'yuni, & Hari Prasetyo. (2024). Rekonstruksi Regulasi Pemekaran Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5), 1178–1192. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2180>
- Rambe, R. A., Alisjahbana, A. S., Wibowo, K., & Muljarijadi, B. (2022). Regional split and local government spending efficiency in Indonesia. *Journal of Economic and Management Sciences*, 5(1), 43–58. <https://doi.org/10.14254/jems.2022.7-2.1>
- Ramdhani, T. W., Florina, I. D., & Permadi, D. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Peretasan Pusat Data Nasional (PDN) di Media Online Tempo.co. *Journal of Education Research (JER)*, 5(3). <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1491>
- Riswandi, A., Abidin, Z., Wulung, E., & Aulia, N. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Online Amsakar

- Achmad sebagai Calon Walikota Batam Potensial pada Media Online Batampos.co.id dan BatamNews.co.id. *Jurnal Ilmu Media Indonesia*, 2(3). <https://doi.org/10.61404/jimi.v2i3.275>
- Ritter, S. (2025). The economic effect of splitting a region in a centralized country: A case from Chile. *Regional Science and Policy & Practice*. <https://doi.org/10.1016/j.gcrs.2025.100011>
- Sari, I., Nurul Wahdaniyah, & Asriadi. (2025). Analisis Framing Media Terhadap Isu Pemindahan Ibu Kota Baru Di Indonesia. *Jurnal Adhikari*, 3(1), 541–550. <https://doi.org/10.53968/ja.v3i1.104>
- Setiawan, H., & Widyana, D. (2023). The Formation of the New Autonomous Region of Papua and Welfare Guarantees in the Decentralization Policy. *Borneo Administrator*, 19(3), 247–262. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i3.1181>
- Sihite, A. S. R., Sijabat, N. V. V., & Rohma, P. N. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Media Online CNNIndonesia.com dan Kompas.com terhadap Kasus Sidang Mahkamah Konstitusi Mengenai Pelanggaran Pemilu 2024. *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication*, 5(2), 63–73. <https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2024.005.02.1>
- Simanjuntak, P. N. S., & Abidin, S. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Rafael Alun Trisambodo di Media Online CNN Indonesia.com dan Kompas.com. *Scientia Journal*, 5(5). <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i5.7604>
- Swianiewicz, P. (2024). The size of the size effect: The impact of municipal splits on local government costs and performance. *Local Government Studies*, 50(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/03003930.2024.2427237>
- Taufiqurrahman, A. (2024). Analisis Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Terhadap Berita Peresmian Monumen Titik Nol Cianjur Selatan dalam Media Online Antaranews.com dan Detik.com. *Buana Komunikasi*, 5(1). <https://doi.org/10.32897/buanakomunikasi.2024.5.1.3475>
- Utami, S. D., Azis, A., & Pranawukir, I. (2024). Analisis Framing CNNIndonesia.com dan Detik.com dalam Pemberitaan Konflik Palestina-Israel Pasca Tewasnya Ismail Haniyeh. *Jurnal Keislaman*, 7(2), 429–447. <https://doi.org/10.54298/jk.v7i2.271>
- Wati, A. R., Aurelya, C., Bernard, C., Hairul, H. F., Linda, L., Leluno, R., Kurniano, R., & Rogate, Y. F. (2024). Analisis Upaya Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Raya Dalam Mewujudkan Daerah Otonomi Baru (DOB). *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Administrasi Publik*, 4(1), 238–246. <https://e-journal.unimudasorong.ac.id/index.php/jipunimuda2/article/view/1422>
- Zhao, X., & Wang, X. (2022). Dynamics of Networked Framing: Automated Frame Analysis of Government Media and the Public on Weibo with Pandemic Big Data. *Journalism & Mass Communication Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/1077699021107250>

Reference Media Online

- Brebesinfo. (2025). *Brebes Selatan paling siap mekar, Pemprov Jateng beri sinyal positif tunggu moratorium dicabut*. <https://brebesinfo.com/berita/brebes-selatan-paling-siap-mekar-pemprov-jateng-beri-sinyal-positif-tunggu-moratorium-dicabut/>
- Indonesia, K. D. N. R. (2024). *Data Usulan Daerah Otonom Baru di Indonesia Tahun 2024*. <https://otda.kemendagri.go.id>
- Jatengdaily. (2024). *Kota Bumiayu bisa menjadi ibu kota Brebes Selatan*. <https://jatengdaily.com/2024/kota-bumiayu-bisa-menjadi-ibu-kota-brebes-selatan/>
- Merdeka, S. (2023). *Daftar usulan DOB baru, termasuk Brebes Selatan*. <https://www.suaramerdeka.com/nasional/049423420/>
- Merdeka, S. (2025). *Viral, usulan DPD RI terkait daftar usulan pembentukan DOB baru: Kabupaten Banyumas Barat, Purwokerto, Cilacap Barat, dan Brebes Selatan*. <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0915596183/viral-usulan-dpd-ri-terkait-daftar-usulan-pembentukan-dob-baru-kabupaten-banyumas-barat-purwokerto-cilacap-barat-dan-brebes-selatan>
- Suarabrebes. (2025). *Selamat datang Kabupaten Brebes Selatan: Pemekaran yang dinanti dari tanah*

*Rochman, B, N., Sutjiatmi, S., Habibullah, A / Vol. 15 No. 04 (2026) 28-39
perbatasan. <https://suarabrebes.com/selamat-datang-kabupaten-brebes-selatan-pemekaran-yang-dinanti-dari-tanah-perbatasan/>*

Tipikor, T. (2025). *Perjuangan untuk mewujudkan Kabupaten Brebes Selatan terus berlanjut.* <https://tribuntipikor.com/2025/04/26/perjuangan-untuk-mewujudkan-kabupaten-brebes-selatan-terus-berlanjut/>